**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA JENIS
MALU-MALU YANG DILINDUNGI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Daf'al Selpas

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum.

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Hr. Soebrantas. Gg. Ijen No.100

Email : bm4005de@gmail.com – Telepon : 085375255150

ABSTRACT

Trade of Lemur as protected animal is all activity about sale and purchase of lemur that violation is what has been regulated by the Law on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. The purpose of this study, To determine the role of the police and Natural Resources Conservation Agencies in law enforcement against traffickers of wildlife protected types of lemurs in the jurisdiction of Pekanbaru City Police, To find barriers in law enforcement against traffickers of protected wildlife timid types in the jurisdiction of Police The resort city of Pekanbaru and, to know the efforts to address the law enforcement against traffickers of wildlife protected types of lemurs in the jurisdiction of the City Police Pekanbaru. This type of research is a sociological law research, because in this study the authors directly conduct research on locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the problems examined. law enforcement against traffickers of wildlife protected by the types of lemurs Pekanbaru City Police and Natural Resources Conservation Agencies Riau Province run up yet because of the presence of obstacles, obstacles encountered in law enforcement against traffickers of protected species of lemurs types by police resort town of Pekanbaru and Natural Resources Conservation Agencies Riau Province is a form of internal factors and external factors, efforts to overcome these barriers is to add investigators Natural Resources Conservation Agencies Riau Province personnel who have expertise in the field of animal protection. Efforts overcome this obstacle is law enforcement against traffickers of protected species of lemurs types should be done more intensively, namely by arresting traffickers protected species of lemurs types. To the government to provide training to investigators and police investigators to better control of the settings on the protected animals, to the entire community to realize that lemurs are protected animals and trading is a criminal offense.

Keywords: Law Enforcement-Crime-Trade of Lemur as protected animal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.¹ Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa-satwa yang diperdagangkan merupakan hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis- jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan di Indonesia.²

Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan dan perlindungan satwa tersebut. Perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah dan terjual di berbagai pasar- pasar hewan. Seperti Malu-malu, padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut. Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang (pasal 21). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp.100 juta (pasal 40).³ Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi dengan demikian adalah merupakan suatu tindak pidana.

Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa

liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.⁴

Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.

Pada pasal 21 ayat 2 poin a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sudah jelas diatur dimana disebutkan: Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”

Serta pada pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tertera sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Kukang (*Nycticebus Coucang*) atau biasa disebut dengan Malu-Malu, dikategorikan sebagai *Vulnerable* (rentan) oleh IUCN pada tahun 1996 yang berarti satwa ini memiliki kemungkinan punah sedikitnya 10% dalam 100 tahun. Namun

¹ Departemen Kehutanan, *Op.Cit*, hlm. 3

² Jhon Martubongs, *Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2004, hlm. 3

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁴ Tony Suhartono, *Op.Cit*, hlm. 6

jenis ini masuk dalam kategori Appendix II oleh CITES pada tahun 1996. Pemerintah Indonesia melindungi malu-malu dengan Peraturan Perlindungan Satwa Liar no. 266 tahun 1931, SK Menteri Pertanian 14 Februari 1973 Nomor 66/Kpts/Um/2/1973, SK Menteri Kehutanan 10 Juni 1991 Nomor 301/Kpts.II/1991 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999.⁵

Perdagangan satwa yang dilindungi jenis malu-malu juga banyak terjadi di wilayah kota Pekanbaru ini, namun pihak kepolisian dalam hal ini Polisi Resort Kota Pekanbaru terkesan melakukan pembiaran akan perdagangan satwa yang dilindungi jenis malu-malu, karna setiap hari aparat kepolisian bisa melihat adanya penjualan satwa lindung jenis malu-malu ini di pasar hewan tapi tidak ada inisiatif melakukan razia ataupun peringatan kepada para penjual ataupun pembeli. Serta berdasarkan pra penelitian yang dilakukan, masih belum adanya data penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan satwa lindung jenis malu-malu di wilayah kota Pekanbaru. Kegiatan perdagangan satwa lindung jenis malu-malu ini di Pekanbaru sudah jelas kita lihat banyak beredar, tetapi tidak ada satupun kasusnya yang ditangani oleh pidak Kepolisian Resort kota Pekanbaru, yang kemudian melatar belakangi penelitian dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”***

⁵ Tjakrawidjaja, A. H., H. Wiriadinata, Heryanto, I. Maryanto, K. Soebekti, M. Noerdjito, Mumpuni, R.M. Marwoto, dan W. A. Noerdjito. *Jenis-jenis Hayati yang Dilindungi Perundang-undangan Indonesia*, Bogor, 2001.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?
2. Hambatan apa saja dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui peranan kepolisian dan BKSDA dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
 - b) Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
 - c) Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana peranan

- kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung
- b) Untuk ilmu yang penulis dapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau
 - c) Untuk memberi sumbangan pemikiran dan bacaan kepada almamater
 - d) Untuk memberi pengetahuan umum pada masyarakat mengenai pentingnya lingkungan ekosistem serta pentingnya peran masyarakat dalam membantu mencegah kepunahan satwa yang dilindungi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁶

Perbuatan pidana tidak sama dengan perbuatan biasa, yaitu perbuatan yang diatur oleh undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar juga, maka akan dapat hukuman (pidana). Oleh karena itu, perbedaannya dengan perbuatan biasa adalah pada segi dasarnya, perbuatan pidana diatur oleh undang-undang sementara perbuatan biasa tidak diatur oleh undang-undang.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dipaksakan sebagai ciri hukum dibandingkan dengan norma lainnya seperti moral, etika, dan sebagainya.⁸

Hukum itu sendiri memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu melindungi dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Metode atau cara bagaimana menjalankan hukum itu sendiri yang diwujudkan dalam suatu perundang-undangan, oleh karena itu dengan kata lain diperlukan adanya suatu politik hukum dalam arti politik hukum pidana. Sudarto juga mengemukakan bahwa politik hukum pidana ialah suatu cara bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, dengan kata lain merupakan suatu bentuk cara melakukan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik, yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁹

Jadi sangat dibutuhkan para penegak hukum yang kualitas nya sangat baik dalam melaksanakan penegakan hukum yang diatur

⁶ Moeljatno, *Op. cit*, hlm. 54.

⁷ Aswani Adam dan Zulfikti Tguan, *Op.Cit*, hlm. 103

⁸ Aswani Adam dan Zulkifli Tguan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, hlm. 14.

⁹ Barda Nawawi, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm. 6

berdasarkan perundang-undangan sehingga bisa terciptanya keadilan ditengah masyarakat dan membawa budaya masyarakat ke budaya yang patuh akan hukum, dengan melakukan penertiban pada penjual dan pembeli satwa lindung jenis malu-malu sehingga kelestarian satwa lindung yang merupakan kekayaan alam Indonesia bisa terjaga sebagaimana mestinya.

3. Teori *Sustainable Development*

Pada tahun 1983 PBB membentuk *World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan) yang diketuai oleh Ny. Gro Brundtland, Perdana Menteri Norwegia. Komisi ini menyelesaikan tugasnya pada 1987 dengan menerbitkan laporan *Our Common Future* yang dikenal dengan Laporan Brundtland. Tema laporan ini adalah *sustainable development*. Komisi ini mendefinisikan *sustainable development* sebagai suatu upaya yang mendorong tercapainya kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan standar lingkungan yang tinggi.¹⁰ Definisi *sustainable development* yang diutarakan oleh *World Commission on Environment and Development* ialah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya,

sebagaimana yang tersaji didalam laporan Komisi yang dikenal sebagai Komisi Brundtland¹¹ yang terumuskan berupa:¹²

“if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

Konsep *sustainable development* sendiri, mengandung dua ide utama di dalamnya, yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Untuk melindungi lingkungan, dibutuhkan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu penyebab penurunan kualitas lingkungan. Masyarakat yang kekurangan pangan, perumahan, dan kebutuhan dasar untuk hidup cenderung menyalahgunakan sumber daya alam hanya untuk tujuan bertahan hidup. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup membutuhkan standar hidup yang memadai untuk seluruh masyarakat dunia.
- b) Kendati demikian, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan, yakni dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang. Pertumbuhan

¹¹ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, 2004, hlm. 147.

¹² David Farrier et. Al., *The Environmental Law, Handbook*, Third Edition Redfren Legal Centre Publishing 1997.

¹³ T. Donaldson dan L.E. Preston, *The Stakeholder Theory of Corporation: Concepts, Evidence, and Implication*”, *Academy of Management Review*, Januari 1995.

¹⁰ <http://www.dephut.go.id>, diakses pada tanggal 11 mei 2015

ekonomi tidak bisa dibenarkan dengan merusak hutan, satwa, lahan pertanian, air, dan udara di mana semua sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia diplanet ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan teori *sustainable development* (Pembangunan berkelanjutan), jika tindak pidana ini terus dilaksanakan tanpa adanya pengurangan jumlah tindak pidana ini secara signifikan, sangat mungkin sekali generasi yang akan datang tak lagi bisa mengenal satwa jenis malu-malu ini secara langsung, dan kita tidak mengetahui akibat dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris, karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci dan jelas mengenai penegakan hukum terhadap penjual dan pembeli satwa lindung jenis malu-malu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru karena wilayah hukum ini banyak terdapat kegiatan perdagangan terhadap satwa lindung jenis malu-malu.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa barang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Kasubnit ekonomi Polresta Pekanbaru;
- 2) Penyidik Unit Ekonomi Polresta Pekanbaru;
- 3) Pedagang Satwa Lindung Jenis Malu- Malu;
- 4) Pembeli Satwa Lindung Jenis Malu-Malu
- 5) Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau;

b) Sampel

Dalam menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Tidak semua populasi yang dijadikan sampel. Kriteria yang di maksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa lindung jenis malu-malu.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden

dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus atau ensiklopedi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yakni pasar tradisional, pasar hewan, dan

petshop yang menjual satwa lindung jenis malu-malu.

- b) Kuisioner, yaitu dengan memberikan pertanyaan semi terbuka kepada responden tentang tindak pidana perdagangan satwa lindung jenis malu-malu.
- c) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan, dalam hal ini dengan Kasubnit Ekonomi serta anggotanya di Polisi Resort Kota Pekanbaru, dan Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.
- d) Kajian Kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku, bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari hasil observasi, kuisioner, wawancara, studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu yang dilindungi Oleh Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan usaha pemerintah dalam melindungi sumber daya alam hayati di Indonesia, yang didalamnya tertera pengaturan pidana terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta ancaman-ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lingkungan tersebut

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya yang memuat peraturan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33, dan 40 merupakan suatu kesatuan.

Pada pasal 21 yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperlakukakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati, malu-malu sebagai salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa maka memiliki perlindungan untuk tidak diperdagangkan/diperniagakan.

Mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana tersebut tertera dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu merupakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tetapi, hingga saat ini bentuk perdagangan satwa yang dilindungi jenis malu-malu masih banyak ditemukan diwilayah kota Pekanbaru, yang berlokasi diberbagai tempat dikota Pekanbaru, pada dasarnya mereka bukan tidak tahu bahwa memperdagangkan satwa lindung jenis malu-malu tersebut melanggar hukum. Berdasarkan wawancara dengan Kasubnit Ekonomi Polresta Pekanbaru Aiptu Hendrimen masyarakat kita sendiri sebagai konsumen masih memiliki permintaan yang tinggi terhadap jenis satwa yang dilindungi ini, namun beberapa konsumen masih tidak mengetahui bahwa satwa ini memang dilindungi, dari pihak kepolisian sendiri masih berusaha menanggulangi tindak pidana ini, apabila terdapat laporan atau tertangkap tangan oleh pihak kepolisian maka akan langsung ditindak, tetapi hingga saat ini untuk pelaporan terhadap perdagangan satwa lindung jenis malu-malu ini masih belum ada dan belum pernah tertangkap tangan.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan *Aiptu Hendrimen*, Kasubnit Ekonomi Polresta Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 22 Juli, Bertempat di Polisi Resor Kota Pekanbaru.

Kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku saat rendah berdasarkan wawancara dengan Ria pedagang satwa lindung jenis malu-malu ini mengatakan bahwa mengetahui malu-malu merupakan hewan yang dilindungi dan merupakan tindak pidana dalam memperdagangkan satwa ini, tetapi minat dan permintaan konsumen yang tinggi menyebabkan malu-malu merupakan satwa yang termasuk populer dan laku dikalangan penjual satwa, sehingga menjadi suatu peluang usaha yang menjanjikan.¹⁵

Perlindungan yang diberikan pada satwa yang terancam punah ini tentu saja berkaitan erat dengan penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok untuk menegakan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok ini tercantum jelas didalam Pasal 13 undang-undang tersebut, dimana dikatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Serta tugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagai penyidik, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi. Hal ini secara jelas menyatakan peran aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ Wawancara dengan *Ria*, Pedagang Satwa Lindung Jenis Malu-Malu, Hari Jum'at, Tanggal 15 Mei 2015, Bertempat di Pasar Hewan Pekanbaru.

dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan satwa lindung sebagai salah satu delik biasa. Oleh karena itu, seharusnya pihak kepolisian serta BKSDA lebih serius dalam memberantas perdagangan satwa malu-malu ini karna saat ini sudah beberapa *petshop* dan kios dipasar hewan menjual malu-malu, apabila tidak ditindak tegas maka akan menyebabkan kepunahan terhadap satwa malu-malu serta akibatnya terhadap ekosistem.

Berdasarkan wawancara terhadap Murmaidin putraver sebagai koordinator penyidik Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam Provinsi Riau bahwa hingga saat ini masih belum ada penangkapan terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu diwilayah Kota Pekanbaru, dikarenakan masih belum adanya laporan masyarakat, serta belum pernah ditemukannya penjualan terhadap malu-malu selama dilakukannya razia oleh petugas BKSDA.¹⁶

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal ini para penyidik dan PPNS harus melakukan razia ke toko yang diduga menjual malu-malu. Namun, faktanya berdasarkan wawancara penulis terhadap Pak Ndut selaku pemilik petshop pasar hewan, beliau mengatakan tidak adanya pihak kepolisian ataupun petugas BKSDA yang datang untuk melakukan pemeriksaan ataupun penyuluhan.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan *Murmaidin Putraver*, Koordinator Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, Hari Jum'at, Tanggal 31 Juli 2015, Bertempat di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

¹⁷ Wawancara dengan *Pak Ndut*, Pedagang Satwa Lindung Jenis Malu-Malu, Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2015, Bertempat di Petshop Pasar Hewan di jalan Arifin Ahmad.

Dari wawancara tersebut dapat kita lihat bagaimana bentuk keseriusan dari pihak kepolisian serta BKSDA dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa malu-malu ini, karena dari wawancara tersebut pihak kepolisian ataupun BKSDA tidak melakukan razia sebagaimana mestinya, dalam artian penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu masih jauh dari harapan.

Pihak kepolisian serta BKSDA tidak pernah melakukan tindakan represif bagi pelaku perdagangan satwa malu-malu yang dilindungi karena pihak kepolisian dan BKSDA belum pernah menangkap pelaku perdagangan malu-malu.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Lindung Jenis Malu-Malu Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

Menurut Koordinator Penyidik PPNS BKSDA yaitu Murmaidin Putraver, banyak faktor yang saling mempengaruhi yang menjadi penyebab tidak efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa lindung jenis malu-malu di Kota Pekanbaru, antara lain:¹⁸

1. Faktor Penegak Hukum

Perlindungan yang diberikan kepada satwa lindung tentu saja berkaitan erat dengan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian dan PPNS dalam hal ini BKSDA. Kepolisian Republik

Indonesia (POLRI) memiliki tugas pokok untuk menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok ini tercantum jelas didalam Pasal 13 undang-undang tersebut, dimana dikatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya didalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dijelaskan salah satu tugas pokok dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam adalah “pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;” dan “penyidik, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;”

Hal ini menegaskan bahwa penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia dan PPNS BKSDA memiliki tanggung jawab penting sebagai tameng dalam melindungi tindak pidana terhadap satwa lindung. Namun yang menjadi hambatan adalah keseriusan dari penegak hukum itu sendiri untuk menegakkan undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam ini, karena dari hasil observasi atau pengamatan dari penulis dilapangan hal yang paling menunjukkan tidak seriusnya para

¹⁸ Wawancara dengan *Murmaidin Putraver*, Koordinator Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, Hari Jum'at, Tanggal 31 Juli 2015, Bertempat di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

penegak hukum masih bebasnya aktifitas perdagangan satwa lindung malu-malu ini.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai konsumen dari perdagangan satwa lindung jenis malu-malu perlu dilibatkan secara aktif. Terutama dalam hal kepemilikan dan aktifitas perdagangan satwa lindung malu-malu. Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui bahwa malu-malu merupakan satwa yang dilindungi dan hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Hal tersebut menandakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang menyebabkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap perlindungan hukum sumber daya alam dan ekosistem. Penyebab banyaknya peminat dari malu-malu dikalangan masyarakat adalah keinginan memiliki satwa tersebut hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi dan dijadikan hewan peliharaan, padahal malu-malu bukanlah merupakan satwa yang bisa dipelihara dengan mudah, malu-malu mudah sekali stress dan menyebabkan kematian. Tetapi, masyarakat tetap memelihara primata ini dengan alasan lain sebagai bentuk hobi ataupun kesenangan eksklusif.

Menurut Murmaidin Putraver selaku penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau saat ini masyarakat sudah banyak memiliki hobi memelihara satwa yang dahulunya tabu untuk dipelihara, baik dari satwa yang berasal dari laut, satwa yang ganas, reptil, bahkan primata seperti malu-malu tersebut. Mereka menganggap memelihara satwa ini sebagai suatu kepuasan tersendiri atau bahkan sebagai suatu bentuk simbol sosial, karna dari beberapa satwa tersebut susah untuk didapatkan.

Tentu saja hal ini menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum untuk memberantas perdagangan satwa malu-malu.¹⁹

3. Faktor Ekonomi dan Sumber Daya Aparat

Menurut wawancara dengan Koordinator Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, hal yang juga menjadi faktor mendasar dalam sulitnya penegakan satwa lindung khususnya malu-malu dikarenakan ekonomi yang masih lemah dimasyarakat yang menjadi alasan mereka melakukan tindak pidana tersebut, memperdagangkan satwa seperti malu-malu memiliki harga jual yang lebih tinggi, sehingga banyak pedagang nakal yang semata-mata mencari keuntungan lebih dengan memperdagangkan malu-malu.²⁰

Beliau juga mengatakan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa malu-malu terdapat faktor yang sangat mempengaruhi yaitu sumberdaya aparat yang masih kurang berkompeten serta jumlah yang masih minim dalam menangani perdagangan satwa lindung, saat ini jumlah penyidik di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau sebanyak 14 orang, dan hanya 5 orang penyidik yang memiliki Skep. Sangat

¹⁹ Wawancara dengan *Murmaidin Putraver*, Koordinator Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, Hari Jum'at, Tanggal 31 Juli 2015, Bertempat di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

²⁰ Wawancara dengan *Murmaidin Putraver*, Koordinator Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, Hari Jum'at, Tanggal 31 Juli 2015, Bertempat di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

disayangkan dengan jumlah yang tergolong minim tersebut masih banyak kurangnya kemampuan para penyidik tersebut didalam pengetahuan mengenai satwa lindung, berdasarkan pertanyaan yang diajukan secara acak oleh penulis kepada para penyidik masih ada penyidik yang tidak tahu mengenai satwa malu-malu sebagai satwa yang dilindungi,²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis memberikan hasil yang sangat disayangkan, sebagai aparat penegak hukum masih ada yang memiliki kompetensi yang kurang. Hal ini dibenarkan oleh Mermaidin Putraver sbagai Koordinator Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, beliau mengatakan saat ini masih banyak penyidik BKSDA yang tidak bisa membedakan dan menentukan satwa yang dilindungi, padahal seharusnya mereka merupakan ahli dibidangnya, sedangkan dari segi oprasional BKSDA memiliki segala fasilitas yang lengkap untuk melakukan tugas sebagai penyidik.

A. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakkan Hukum Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu yang dilindungi Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat penegak hukum

Peningkatan terhadap kualitas dari para penegak hukum terhadap pelaku

perdagangan satwa lindung jenis malu-malu diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal ini ialah Penyidik Unit Ekonomi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, seharusnya diberikan pelatihan tentang pengaturan terhadap satwa lindung guna meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, serta menambah jumlah personil aparat penegak hukum dengan tujuan efektifitas penyidikan.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum

Kepolisian dan BKSDA adalah aparat yang menjadi benteng paling depan dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa lindung malu-malu, diperlukan peran aparat penegak hukum lebih baik aktif lagi dalam menegakkan undang-undang sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan keseriusan dan juga ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menegakkan undang-undang agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih terhadap populasi satwa lindung. Namun dalam kenyataan banyak aparat penegak hukum yang kurang serius dalam menegakkan tindak pidana ini bahkan banyak oknum penegak hukum yang membeking pelaku tindak pidana sehingga sulit untuk menegakkan undang-undang tersebut. Hal ini tidak lepas dari kurangnya gaji yang diterima oleh penegak hukum sehingga banyak oknum penegak hukum mencari uang sampingan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu diperlukan juga peran aktif dari pemerintah yakni dengan meningkatkan kesejahteraan dari aparat penegak hukum dengan cara

²¹ Wawancara dengan *Murmaidin Putraver*, Koordinator Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, Hari Jum'at, Tanggal 31 Juli 2015, Bertempat di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

menaikan gaji yang diterima setiap bulannya.

3. Memberikan penyuluhan kepada pedagang

Upaya yang juga dapat dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa lindung khususnya malu-malu ialah dengan melakukan sosialisasi oleh aparat terhadap para pedagang satwa di wilayah Kota Pekanbaru, dengan tujuan agar masyarakat sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dan dari penyuluhan tersebut juga memiliki tujuan agar kesadaran masyarakat dan pedagang pentingnya peran satwa bagi suatu lingkungan demi keberlangsungan hidup manusia serta sebagai suatu warisan berharga yang nantinya bisa diwariskan kepada anak cucu bangsa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya keseriusan oleh aparat penegak untuk menindak lanjuti para pelaku tindak pidana perdagangan satwa lindung jenis malu-malu disamping itu belum adanya pelaku

tindak pidana tersebut yang ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu terdapat beberapa kendala baik pengak hukum, kesadaran masyarakat, sumber daya penegak hukum itu sendiri yang dinilai masih kurang kompeten dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana perdagangan satwa lindung jenis malu-malu.

Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yakni dengan menambah personil penyidik BKSDA Provinsi Riau yang mempunyai keahlian dibidang perlindungan satwa.

A. Saran

Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru seharusnya dilakukan lebih intensif, dengan menangkap pelaku perdagangan satwa lindung jenis malu-malu, agar potensi semakin berkembangnya praktik perdagangan satwa lindung jenis malu-malu dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

Kepada pemerintah agar memberikan pelatihan kepada penyidik PPNS dan kepolisian untuk lebih menguasai pengaturan tentang satwa lindung, dan melakukan prekrutan yang lebih mengutamakan kualitas dari aparat pengak hukum agar tindak pidana ini dapat diberantas secara meyeluruh.

Kepada para pelaku perdagangan terhadap satwa lindung jenis malu-malu agar dapat memahami bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi penjara, selain itu perbuatan itu juga mengakibatkan ketidak seimbangan ekosistem yang nantinya bisa mempengaruhi kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan kesadaran dari masyarakat agar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemya bisa ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. A. BUKU

A. H , Tjakrawidjaja, H. Wiriadinata, Heryanto, I. Maryanto, K. Soebekti, M. Noerdjito, Mumpuni, R.M. Marwoto, dan W. A. Noerdjito, 2001, *Jenis-jenis Hayati yang Dilindungi Perundang-undangan Indonesia*, Bogor.

Adam, Aswarni dan Zulfikri Tguan, 2006, *Prinsip – Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Bethan, Syamsuhardi, 2008, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri*

Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi, Alumni, Bandung.

Chawazi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Press, Jakarta.

Departemen Kehutanan, 2007, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta.

Donaldson, T. dan Preston, L.E, 1995, *The Stakeholder Theory of Corporation: Concepts, Evidence, and Implication*, Academy of Management Review.

Farrier, David, et. Al, 1997, *The Environmetal Law, Handbook*, Third Edition Redfren Legal Centre Publishing.

Helmi, *Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal, 2011

Hamzah , Andi, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Ilyas, Amir, 2012 *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta,

Martubongs, Jhon, 2004, *Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

Nawawi, Barda, 1996, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Citra Aditya, Bandung.

Saleh, Ruslan, 1983, *Perbuatan dan Pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Salim, Emil, 1990, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta.

Siahaan, N. H. T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

_____, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.

Sianturi, SR, 2002, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta.

Soeharto, Tony, dkk, 2003, *Pelaksanaan Konvensi CITES*, Jakarta, 2003.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

B. B. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus lengkap Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

C. C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

Mirza, Rini, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi, *Skripsi*, USU, Medan, 2008

Rianzar, Muhammad, studi populasi kukang sumatera (*nycticebus coucang*) di hutan lindung batutegi blok rilau, *skripsi*, Universitas Lampung, Lampung, 2013

Samekto, Aji, “Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam Studi Hukum Kritis”, *Disertasi*, PPS, Undip, Semarang, 2004

Winarti, Indah, “Distribusi dan Struktur Vegetasi Habitat Kukang Di Desa Mekar, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat”, *Skripsi*, Program sarjana Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 2003.